

Teori Signifikansi Dayah M. Hasbi Amiruddin

Oleh; Zulkifli Abdurrahman Usman

Zulkifli82@unsam.ac.id

Dalam bahasa Aceh, istilah untuk lembaga yang dikenal dengan nama *pesantren* di Jawa dan seluruh Indonesia adalah *dayah*.¹ Kata *dayah*, juga sering diucapkan *deyah* oleh masyarakat Aceh Besar, diambil dari bahasa Arab *zawiyah*.² Istilah *zawiyah*, yang secara literal bermakna sebuah sudut, diyakini oleh masyarakat Aceh pertama kali digunakan sudut Masjid Madinah ketika Nabi Muhammad berdakwah pada masa awal Islam.³ Orang-orang ini, sahabat Nabi, kemudian menyebarkan Islam ke tempat-tempat lain. Pada abad pertengahan, kata *zawiyah* dipahami sebagai pusat agama dan kehidupan mistik dari penganut tasawuf, karena itu, didominasi hanya oleh ulama perantau, yang telah dibawa ke tengah-tengah masyarakat.⁴ Kadang-kadang lembaga ini dibangun menjadi sekolah agama dan pada saat tertentu juga *zawiyah* dijadikan sebagai pondok bagi pencari kehidupan spiritual.⁵ Sangat mungkin bahwa Islam disebarkan ke Aceh oleh para pendakwah tradisional Arab dan sufi; ini mengindikasikan bagaimana *zawiyah* diperkenalkan di Aceh.

Syekh Ishaq al-Makarani al-Pasi menyebutkan dalam kitabnya *Idar al-Haq*, bahwa kelompok Muslim, yang dipimpin oleh Nakhoda Khalifah dan terdiri dari orang-orang Persia dan Arab, tiba di Bandar Peureulak Pantai Utara Sumatera pada tahun 800 M, kemudian mendirikan sebuah perkampungan di sana.⁶ Dalam sumber lain, yang ditulis oleh orang yang bukan pribumi, menyatakan bahwa Muslim pertama yang mengunjungi Indonesia diperkirakan pada abad ketujuh, ketika pedagang Arab berhenti di Sumatera untuk menuju ke China.⁷ Hal ini sangat mungkin terjadi, karena pedagang inilah yang memperkenalkan Islam di sana, sebagaimana di tempat-tempat lain ketika Islam disebarkan oleh pedagang Muslim. Pada gilirannya, kejadian ini menunjukkan bahwa kata *zawiyah*, yang sangat banyak dipakai di Jazirah Arab, kemudian diperkenalkan ke Aceh melalui hubungan tersebut.

Kendatipun, *dayah* dianggap sama dengan *pesantren* di Jawa dan *surau* di Sumatera Barat, namun ketiga lembaga pendidikan tersebut tidaklah persis sama,

¹James Siegel, *The Rope of God*, (Los Angeles: University of California Press, 1969), h. 48

²C. Snouch Hurgronje, *The Atjehnese*, A.W.S O'Sullivan (terj), Vol. I, (Leiden: E.J.Brill, 1906), h. 63.

³Tgk. Mohd Basyah Haspy, *Apresiasi terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan terhadap Tata Krama dan Kehidupan Dayah*, (Banda Aceh: Panitia Seminar Apresiasi Pesantren di Aceh Persatuan Dayah Inshafuddin, 1987), h. 7.

⁴H. A. R. Gibb dan J. H. Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1961), h. 657.

⁵*Ibid.*

⁶Junus Djamil, *Silsilah Tawarich Raja-raja Kerajaan Aceh*, (Banda Aceh: Diterbitkan dengan usaha Adjudan Djendral Kodam Iskandar Muda, 1968), h. 4.

⁷Harry W. Hazard, *Atlas of Islamic History*, (Princeton University Press, 1952), h. 45.

setidak-tidaknya latar belakang historisnya. Pesantren sudah ada sebelum Islam tiba di Indonesia.⁸ Dalam hal ini, Sugarda Poerbakawatja telah meneliti bahwa pesantren lebih mirip lembaga pendidikan Hindu ketimbang kepunyaan Arab (baca: lembaga pendidikan Islam, pen.), meskipun lembaga tersebut mempunyai karakteristik lembaga pendidikan Islam.⁹ Istilah “pesantren” diambil dari kata “santri” mendapat penambahan “pe” di depan dan “an” diakhir, dalam bahasa Indonesia berarti tempat tinggal santri, tempat di mana para pelajar mengikuti pelajaran agama. Istilah “santri” diambil dari kata *shastri* (castrī=India), dalam bahasa Sangsekerta bermakna orang yang mengetahui kitab suci Hindu.¹⁰ Ketika Islam datang, tujuan lembaga ini diarahkan kepada tujuan Islam. Perbedaan lain antara pesantren dan dayah adalah pesantren menerima kelas bagi anak-anak sementara dayah hanya menerima orang dewasa saja. Syarat minimal yang dapat diterima di dayah adalah telah menyelesaikan sekolah dasar, mampu membaca Al-Qur’an dan bisa menulis tulisan Arab.¹¹

Surau di Minangkabau, Sumatra Barat, merupakan suatu institusi penduduk asli Minangkabau yang telah ada sebelum datangnya Islam ke Minangkabau. Surau milik satu suku atau *indu*,¹² dan dibangun untuk melengkapi *rumah gadang* (rumah adat) yang terdiri dari beberapa famili “(dikenal *separuik* atau satu keturunan) yang tinggal di bawah kepemimpinan seorang *datuk* (kepala suku). Nampaknya surau sudah pernah dipergunakan sebagai tempat untuk ritual agama Hindu-Budha. Hal tersebut berdasarkan pada tahun 1356, Raja Adityawarman membangun surau Budha di sekitar perumahan Bukit Gombak, dan kelihatannya surau tersebut digunakan untuk melayani anak muda agar mendapat pengetahuan tentang adat istiadat.¹³ Pada masa tersebut, surau juga berfungsi sebagai tempat berkumpul, tempat musyawarah dan tempat tidur bagi anak laki-laki yang menginjak dewasa atau orang laki-laki tua. Fungsi ini sesuai dengan adat Minangkabau bahwa anak laki-laki tidak punya kamar di rumah *gadang*-rumah orang tua mereka. Hanya anak perempuanlah yang tinggal di rumah *gadang* dalam kamar yang dibuat oleh orang tua mereka.¹⁴ Ketika Islam datang, surau

⁸Sudirman Tebba, “Dilemma Pesantren Belenggu Politik dan Pembaharuan Sosial” dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985), h. 268.

⁹Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Gunung Agung, 1970), h. 17-18.

¹⁰C. C. Berg, “Indonesia,” H. A. R. Gibb (ed.), *Whither Islam: A Survey of Modern Movement in the Muslim World*, (London: Victor Gollancz & Ltd., 1932), h. 257.

¹¹Muhammad Hakim Nyak Pha, *Apresiasi terhadap Tradisi dayah: Suatu Tinjauan Tata krama Kehidupan Dayah*, makalah disampaikan dalam Seminar Apresiasi Dayah Persatuan Dayah Inshafuddin di Banda Aceh, pada tahun 1987, h. 8.

¹²Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1983), h. 291.

¹³Christine Dobbin, *Islamic Revivalism in Changing Peasant Economy: Central Sumatra 178-1847*, (London: Curzon Press, 1983), h. 120-121.

¹⁴Azyumardi Azra, “Surau di Tengah Krisis: Pesantren dalam Perspektif Masyarakat,” dalam M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985), 156.

diislamisasikan. Di samping sebagai tempat pertemuan dan tempat tidur, *surau* menjadi tempat untuk mempelajari ajaran Islam, membaca Al-Qur'an dan tempat shalat. Manakala menjadi tempat shalat di awal berkembangnya Islam, *surau* telah berfungsi sebagai masjid kecil.

Meskipun demikian, dalam rentang waktu, dibangun dua tempat yang berbeda, yaitu *surau* dan masjid. Masjid dijadikan sebagai tempat yang hanya untuk peribadatan belaka, seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at dan shalat dua hari raya. Di sisi lain, *surau* berfungsi sebagai tempat asrama bagi pemuda dan tempat belajar membaca Al-Qur'an dan pengetahuan agama, untuk praktik ritual keagamaan, *suluk*, dan tempat orang-orang berkumpul untuk berbagai pertemuan.

Dengan demikian, dayah, pesantren dan *surau* mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda, kendatipun mempunyai fungsi yang sama. Penting dicatat bahwa dayah, seperti pesantren, mungkin juga dikembangkan dari lembaga pendidikan Hindu. Hindu telah ada di Aceh sebelum kedatangan Islam¹⁵ meskipun tidak begitu kuat pengaruhnya seperti yang terjadi di Jawa. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh Islam terhadap rakyat Aceh sangat kuat, dalam banyak aspek kehidupan mereka, sehingga orang-orang Aceh telah menghilangkan warna-warna pengaruh Hindu. Dalam beberapa hal, lembaga-lembaga ini mempunyai kemiripan di mana para murid diharuskan menetap di kampus, yang di sana terdapat rumah-rumah untuk guru dan asistennya, asrama siswa, satu masjid atau *mushalla* (masjid kecil) dan ruang-ruang belajar untuk murid.¹⁶ Kampus ini diatur oleh seorang atau beberapa orang yang dipanggil *teungku*.

Sementara itu, pesantren di Jawa telah mendapat perhatian banyak para sarjana, sedangkan dayah di Aceh belum dikaji secara mendalam. James T. Siegel dalam bukunya *The Rope of God* menelaah dengan singkat tentang lembaga tersebut, namun dalam buku itu hanya mengkaji tentang dayah pada akhir abad ke-19 dan hingga pertengahan abad ke-20. Saya tidak menemukan satu studi pun mengenai sejarah perkembangan lembaga tersebut. Meskipun C. Snouck Hurgronje mengatakan *deah* (dayah) dan *rangkang*¹⁷ beberapa kali dalam *The Achehnese*-nya, dia tidak membicarakannya secara komprehensif atau memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman kita mengenai lembaga tersebut. Ketidakjelasan uraian Hurgronje, dapat dipahami karena ia menghabiskan sedikit waktu di Aceh dan kurangnya informasi yang ia bisa dapatkan, sebab ia tidak boleh bergerak keluar dari *linie* (wilayah dalam pengawasan Belanda). Oleh karena itu, dayah tidak mendapat perhatian yang serius dalam studinya di Aceh.¹⁸ Beberapa penelitian tentang dayah di berbagai kawasan di

¹⁵P. A. Hoesein Djajadiningrat, "Islam in Indonesia," dalam Kenneth W. Morgan (ed.), *Islam the Straight Path: Islam Interpreted by Muslims*, (New Delhi: Motilal Nanarsidass, 1958), h. 375.

¹⁶Di dayah tempat belajar di sebut *bale*.

¹⁷Nama lain bagi dayah .

¹⁸Menurut pandangan L. F. Brakel, untuk memahami pandangan Snouck ini, penting dicatat bahwa ada dua faktor yang dipertimbangkan. *Pertama*, Snouck membatasi ruang geraknya pada wilayah

Aceh telah dilakukan sejak tahun 1970-an oleh para peneliti dari PLPIIS (Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial) di Aceh, tetapi kajian tersebut sangat parsial, tidak komprehensif, dalam hal ini mereka kurang memberi perhatian mengenai sejarah dayah sebelum abad ke-20.

Menurut A. Hasjmy, sejarawan lokal terkemuka, setelah Kerajaan Islam Peureulak pertama kali berdiri pada bulan Muharram tahun 225 H. (840 M.), sultan mendirikan beberapa lembaga pendidikan Islam. Sultan meminta beberapa ulama dari Arabia, Persia, dan Gujarat untuk mengajar di lembaga ini. Agar menghasilkan sarjana Islam yang bisa mengembangkan ajaran Islam di seluruh Aceh, sultan membangun satu dayah yang diberi nama Dayah Cot Kala. Dayah ini dipimpin oleh Tgk. Muhammad Amin, belakangan dikenal dengan sebutan Tgk. Chik Cot Kala. Lembaga pendidikan ini merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam pertama di Kepulauan Nusantara. Para ulama yang tamat dari lembaga ini kemudian menyebarkan Islam ke wilayah lain di Aceh dan mendirikan dayah-dayah lain (seperti Dayah Seureuleu, Dayah Blangpria dsb.).¹⁹ Kendati demikian, data ini tidak cukup untuk menghitung berapa banyak dayah yang didirikan pada masa sultan. Demikian juga dengan data yang menunjukkan kapan dayah-dayah tersebut telah ada. A. Hasjmy, salah seorang yang banyak memberi perhatian terhadap kajian ini tidak menyebutkan data yang jelas tentang pendirian lembaga tersebut. Dia menyebutkan bahwa Dayah Seureuleu di Aceh Tengah didirikan antara tahun 1012-1059, Dayah Blangpria di Samudra Pasai, Aceh Utara antara tahun 1155-1233, Dayah Lamkeuneun Aceh Besar antara 1196-1225, Dayah Tanoh Abee, juga di Aceh Besar, antara 1823-1836, dan Dayah Tiro, di Pidie antara 1781-1795.²⁰ Snouck Hurgronje menyebutkan beberapa nama dayah yang telah ada sebelum kedatangan Belanda, seperti Dayah Ie Leubeue, dan Dayah Tiro, keduanya di Aceh Pidie, dan Dayah Lamnyong, Dayah Krueng Kale, Dayah Lamseunong, Dayah Tanoh Abee, semuanya di Aceh Besar. Namun demikian, ia tidak menyebutkan kapan dayah-dayah itu didirikan.²¹

Pada masa kesultanan, dayah menawarkan tiga tingkatan pengajaran, *rangkang* (junior), *balee* (senior) dan *dayah manyang* (universitas).²² Di beberapa dayah hanya terdapat junior (*rangkang*) dan senior (*balee*), sedangkan di tempat lain hanya ditemui tingkatan universitas saja. Meskipun demikian, di tempat tertentu juga terdapat tiga

yang berada pengawasan Belanda. *Kedua*, hal ini tidak harus diabaikan bahwa tujuan dari pada karya Snouck mengandung muatan polemik; yakni menghentikan perang, dengan demikian maka Aceh dapat ditundukkan. Lihat L.F. Brakel, "State and Satecraft in 17th Century Aceh," dalam Anthony Reid dan Lance Castles (eds.), *Pre-Colonial State System in Southeast Asia: The Malay Peninsula, Sumatra, Bali-Lombok, South Celebes*, MBRAS (1979), h. 57.

¹⁹A. Hasjmy, "Pendidikan Islam di Aceh dalam Perjalanan Sejarah," *Sinar Darussalam*, No. 63, (1975), h. 7-9.

²⁰*Ibid.*, h. 8-9.

²¹ Hurgronje, *The Atjehnese*, h. 26.

²²Penggunaan istilah universitas di sini semata-mata untuk memberi gambaran umum sebagai mencari perbandingan dengan Muslim modern, kendatipun istilah ini tidak tepat untuk digunakan pada masa Muslim pra-modern.

tingkatan sekaligus, mulai dari junior sampai universitas. Sebelum murid belajar di dayah, mereka sudah mampu membaca Al-Qur'an. Kemampuan membaca Al-Qur'an tersebut mereka dapatkan dari rumah atau dari seorang *teungku* di *meunasah*. Informasi tentang kurikulum sangat langka yang bisa didapatkan dari latar belakang sejarah dayah; tidak seorang sarjana pun yang menjelaskan tentang hal ini. Pada dasarnya, A. Hasjmy sangat kesulitan dalam menjelaskan apa yang diajarkan di dayah-dayah pada waktu itu. Dia hanya dapat menduga bahwa apa yang diajarkan di dayah berdasarkan dari sebuah dokumen, *Kanun Meukuta Alam*, yang ada pada masa Sultan Iskandar Muda. Dalam dokumen ini, disebutkan bahwa sekitar 21 syarat untuk dapat diangkat menjadi sultan, ketaatan kepada hukum Allah dan Rasulullah serta mengamalkan semua prinsip-prinsip Islam. Di antara sepuluh syarat diangkat menjadi menteri adalah memiliki ilmu pengetahuan agama dan umum, dapat dipercaya dan loyal. Di antara sepuluh syarat diangkat menjadi *qadhi*, yaitu adil, menguasai ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama, dan ahli dalam mengambil keputusan.²³ Dari dasar-dasar yang tercantum dalam *kanun*, A. Hasjmy berkesimpulan bahwa tujuan dari lembaga pendidikan waktu itu adalah untuk menghasilkan orang yang siap untuk menjadi sultan, menteri, *qadhi* atau beberapa jenis kegiatan administrasi perkantoran. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dayah-dayah pada masa ini tidak hanya mendidik para murid mereka dalam masalah agama -dalam wilayah yang terbatas-, tetapi juga menyediakan tawaran ilmu pengetahuan lainnya yang dapat menjadikan seseorang mampu mengatur negara dalam berbagai kapasitas.²⁴ Namun demikian, ada juga sumber yang menunjukkan kepada kita beberapa petunjuk tentang subjek-subjek yang diajarkan di dayah pada waktu itu. Seperti ketika Sultan Husein (1717-1579), sarjana Mekkah dari Mesir yang bernama Syekh Muhammad Azhari mengajar metafisika.²⁵ Pada masa Sultan Mansur Shah (1579-1585), seorang sarjana terkenal, Abu al-Kahar Ibn Syekh Ibn Hajar, pengarang *Sharf al-Qati'* juga datang ke Aceh mengajar hukum Islam di dayah. Pada waktu bersamaan, Syekh Yamani mengajar teologi dan Muhammad Jailani Ibn Hasan Hamid mengajar logika (*mantiq*) dan *al-Usul Fiqh* di Aceh.²⁶ Lebih lanjut, A. Hasjmy mengatakan bahwa pada masa Iskandar Muda memimpin Kerajaan Islam Aceh (1607-1636), terdapat 44 Syekh yang mengajar berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, politik, sejarah, kesehatan, dan pertanian, sebagai tambahan dari ilmu agama.²⁷ Sebagaimana disebutkan pada bab pertama, Iskandar Muda sendiri mendapat pelajaran militer ketika ia masih muda.²⁸

²³Di Meulek, *Kanun Meukuta Alam*, (ttp: t.th) naskah Arab-Melayu, h. 30-61.

²⁴A. Hasjmy, "Pendidikan Islam", h. 13.

²⁵Nur al-Din al-Raniri, *Bustanu's-Salatin Bab II, Pasal 13*, T. Iskandar (ed.), (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka, 1966), h. 33.

²⁶ Syed Muhammad Naquid al-Attas, *Raniry and the Wujudiyah of the 17th Century Aceh*, (Singapore: MBRAS, 1966), h. 43.

²⁷A. Hasjmy, "Pendidikan Islam"..., h. 14-15.

²⁸T. Iskandar, *De Hikayat Atjeh*, ('S-Gravenhage: N.V.De Nederlands Boek-En Steendrukkeryj, V. H. L. Smith), h. 153.

Menurut Baihaqi, bermacam pengetahuan agama dan umum telah diajarkan di dayah sebelum masa Perang Belanda-Aceh, termasuk di dalamnya astronomi, kesehatan dan pertanian.²⁹ Pendapatnya didukung berdasarkan pada kenyataan bahwa Tgk. Kuta Karang menulis kitab yang berjudul *Taj al-Mulk* yang berhubungan dengan astronomi dan pertanian. Buku tersebut dicetak di Kairo dan Mekkah pada tahun 1893, terdiri dari cara-cara menghitung waktu yang cocok dalam musim, ramalan-ramalan cuaca, pengobatan dan metode menandai waktu.³⁰

Perang Belanda-Aceh membawa petaka bagi sejumlah dayah. Dalam banyak kasus, dayah-dayah tersebut hangus dibakar atau staf pengajarnya banyak terbunuh di medan peperangan.³¹ Seluruh perpustakaan dihancurkan, dan jika tersisa buku yang mendukung ilmu pengetahuan umum seperti astronomi dan lain sebagainya, tidak ada ulama yang *capable* yang mengajari mereka.³² Meskipun para ulama membangun kembali dayah-dayah di masa pendudukan Belanda, aktivitas dan sumber daya mereka sudah serba terbatas. Beberapa dayah yang dibangun, terletak jauh dari daerah pengawasan Belanda. Akhirnya, dayah-dayah tersebut terisolasi dan jarang berhubungan dengan para ilmuwan. Cakupan materi yang diajarkan dibatasi hanya pada materi agama saja, seperti fiqh, tauhid, dan tasawuf, yang merupakan bagian dari ajaran Islam.

Pada tahun 1930-an, beberapa ulama di dayah-dayah dipengaruhi oleh gagasan para pembaharu khususnya ide-ide tentang sistem pendidikan. Ini dapat dilihat dari keputusan mereka untuk mengganti dari nama dayah ke madrasah. Beberapa madrasah yang dibangun pada waktu itu, diharapkan dapat mengatur kurikulum dan metode mengajar untuk disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat khususnya dalam merespon ilmu pengetahuan modern. Kendati demikian, pengaturan tersebut tidak seperti yang diharapkan, karena atmosfer politik di Aceh ketika itu tidak stabil dan tidak semua ulama sepakat dengan beberapa pengaturan tersebut. Pemimpin Aceh dan ulama sering terlibat dalam kegiatan politik, seperti mengusir keluar Belanda dan Jepang dari Aceh. Dalam tiga tahun pertama setelah kemerdekaan Indonesia (1945-1948) para pemimpin dan ulama Aceh juga terlibat dalam mobilisasi massa untuk mempertahankan tanah air mereka dari pendudukan kembali oleh Belanda. Demikian juga, ketika masa-masa awal kemerdekaan, seluruh madrasah diserahkan di bawah kontrol negara, sementara dayah tetap di bawah kontrol para ulama. Sejak saat itu, meski dayah dan madrasah tetap eksis di Aceh, tetapi mereka berjalan secara terpisah.

²⁹Tanggapan Baihaqi A. K. terhadap seminar “Reformasi Pendidikan Dayah,” Dalam *Peningkatan Dajaguna Potensi Islam untuk Pembangunan*. (Darussalam-Banda Aceh: Seksi Seminar Panitia Dies Natalis Ke-VIII IAIN Djami’ah Ar-Raniry, 1972), h. 9.

³⁰Hurgronje, *The Atjehnese...*, h. 33.

³¹Sebagai contoh, lihat Mannan Nur, *Studi tentang Dayah di Samalanga*, (Banda Aceh: PLPIIS, 1975). Dalam studinya, dia menemukan bahwa ada 9 dayah yang didirikan sekitar abad kesembilan belas di Samalanga (sekarang menjadi salah bagian kabupaten Bireuen) yang ditutup karena situasi perang melawan Belanda.

³²Tanggapan Baihaqi A. K., h. 9.

Sementara, para pemimpin Aceh menata kembali struktur politik mereka yang sebelumnya tidak stabil, satu perselisihan yang tidak diperkirakan terjadi antara pemerintahan pusat (Jakarta) dan Aceh (pemerintahan daerah). Perselisihan ini menyebabkan Aceh memberontak terhadap pemerintah pusat pada tahun 1953, satu situasi yang tidak menguntungkan yang terjadi hampir 9 tahun. Pada waktu itu, pemerintah maupun rakyat tidak mencapai suatu kemajuan yang berarti, karena keadaan yang tidak kondusif untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Kegiatan dayah-dayah berjalan seperti masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, sampai sekarang, dayah memfokuskan pada materi-materi Islam yang tradisional saja, seperti teologi, fiqh, dan tasawuf. Bahasa Arab diajarkan sebagai alat untuk memahami teks-teks kitab yang diajarkan di dayah. Seluruh subjek yang diajarkan didasarkan pada karya-karya besar ulama madzhab Syafi'i yang ditulis dalam bahasa Arab klasik.³³

Metode mengajar di dayah pada dasarnya dengan oral dan metode hafalan. Guru dan muridnya biasanya duduk dalam sebuah lingkaran (*halaqah*), tetapi sejak 1960-an kebanyakan dari mereka menggunakan ruang kelas seperti sekolah umum, yaitu murid-muridnya duduk di atas kursi. Guru menerangkan teks-teks agama kepada murid-murid yang duduk di sekitar atau di depannya, mendengarkan diskusi dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Metode lain adalah para murid datang satu per satu kepada seorang guru dengan *copy* teks (*Kurah*) yang sedang mereka pelajari, kemudian guru membaca teks, memberikan komentar dan catatan dalam bacaannya tersebut, kemudian meminta murid untuk membaca kembali teks yang telah ia bacakan. Meskipun demikian, pada kelas yang paling tinggi, diskusi lebih dianjurkan dalam segala aktivitas proses belajar mengajar, dan ruang kelas hampir merupakan sebuah ruang seminar. Para guru biasanya berfungsi sebagai moderator, yang kadang-kadang juga berperan sebagai pengambil keputusan.³⁴

Sejak tahun 1980-an, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para intelektual baik yang berasal dari dayah atau sekolah lain, untuk mengubah dua hal yaitu sistem dan kurikulum dayah, untuk menjadikan lembaga ini sesuai dengan kebutuhan dunia modern. Dengan begitu, dayah-dayah tersebut dijadikan sebagai dayah terpadu (*integrated dayah*). Dari segi kurikulum dan sistem mengajar, mereka mengikuti sistem madrasah. Kurikulum madrasah diajarkan pagi hari, sedangkan sore hari, diterapkan kurikulum dan sistem dayah. Dalam dayah-dayah tersebut, para murid diharuskan untuk tinggal di kampus, sebagaimana yang diterapkan pada dayah-dayah tradisional. Sejalan dengan itu tidak seperti dayah-dayah tradisional, dayah terpadu tidak mengajarkan kitab-kitab yang lebih tinggi (*advanced texts*). Oleh karena itu,

³³Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kurikulum yang ditawarkan, lihat "Lampiran V. Kurikulum" dalam *Himpunan Hasil-hasil Mubes III Persatuan Dayah Inshafuddin di Banda Aceh*, (Banda Aceh: Pengurus Besar Inshafuddin, 1989), h. 33-38.

³⁴Koresponden dengan Tgk. Ibrahim, pimpinan Dayah Darussalihin, Pantan Labu, 20 Oktober 1993. Lihat juga Rusdi Sufi, *Pandangan dan Sikap Ulama di Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Proyek Penelitian Pandangan dan Sikap Hidup Ulama di Indonesia, lipi, 1987), h. 29.

mutu pengetahuan Islam yang dimiliki oleh lulusan dayah terpadu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai seorang *ulama*. Di dayah tradisional, ada beberapa kitab standar yang diajarkan, seperti *al-Bajuri*, *al-Mahalli*, *nihaya al-Muhtaj* dan *al-fiqh 'ala al-madhahib al arba'ah* dalam bidang ilmu fiqh, dalam bidang tasawuf *Ihya 'Ulum al-Din*, dan *al-Sanusi* dalam bidang teologi. Kitab-kitab ini tidak diajarkan di dayah terpadu. Selain itu dayah terpadu merupakan lembaga pendidikan yang masih baru dan belum tersebar luas.

Menurut kebiasaan orang Aceh, belajar di dayah -satu praktek yang disebut *meudagang* (mengerja ilmu agama)- biasanya membutuhkan waktu yang lama. Tidak ada waktu tertentu untuk belajar di dayah. Artinya, seorang murid datang dan meninggalkan dayah kapan ia suka. Beberapa murid belajar di beberapa dayah, berpindah dari satu dayah ke dayah lain, setelah belajar beberapa tahun. Jumlah tahun yang dihabiskan oleh seorang murid tergantung pada ketekunannya atau pengakuan guru bahwa murid itu telah selesai dalam studinya. Murid kadang-kadang ingin melanjutkan studinya di dayah sampai ia sanggup mempunyai dayah sendiri. Waktu yang diperlukan untuk belajar di dayah -minimal 12 tahun, kadang-kadang sampai 14 tahun- sebelum orang tersebut diakui menjadi salah seorang daripada ulama. Cara yang biasanya dipakai murid untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mendapatkan kepercayaan dari kelompoknya, karena kemampuannya dalam menjelaskan isi kitab dan membantu para murid ketika guru tidak ada. Pada gilirannya, dengan pertemuan secara informal itu, beberapa murid datang kepadanya yang membutuhkan penjelasan tentang isi kitab sampai kemudian ia diakui sebagai seorang yang cukup ilmunya oleh gurunya, yakni Tgk. Chik. Dalam kaitan ini, tidak ada penghargaan secara diploma.³⁵ Karena itu, setelah belajar beberapa tahun secara bertahap, ia akan terjun ke dunia kehidupan atau bekerja sebagai guru di *meunasah*. Kebanyakan dari mereka mungkin menjadi da'i atau imam-imam di masjid-masjid. Sedikit dari mereka yang melanjutkan hingga diakui sebagai ulama dayah.³⁶

A. Signifikansi Dayah

Berdasarkan kenyataan ada 4 kegunaan dayah bagi orang Aceh: (1) sebagai pusat belajar agama; (2) benteng terhadap kekuatan melawan penetrasi penjajah; (3) agen pembangunan, (4) sekolah bagi masyarakat.

1. Dayah sebagai Pusat Belajar Agama dan Cendekiawan

³⁵Sekarang beberapa dayah memberikan ijazah jika muridnya membutuhkan, misalnya yang ingin melanjutkan studinya ke IAIN (Institute Agama Islam Negeri).

³⁶Mengajar di satu *meunasah* dan menjadi imam shalat adalah pekerjaan sukarela. Dalam hal ini tidak dibayar kecuali dari shadaqah. Penghasilan mereka sebagai guru tersebut, yaitu didapatkan dari profesi sebagai pedagang atau petani; meski beberapa ulama yang memimpin dayah juga bekerja sebagai petani, dan sebagai tukang kayu atau servis mekanik, dsb.

Sebagaimana telah dijelaskan, sejak pertama kali Islam datang ke Aceh, bahwa tidak terdapat lembaga pendidikan lain kecuali dayah. Lembaga ini telah menghasilkan beberapa sarjana terkenal dan pengarang yang produktif. Pada abad ke-17, ketika masa kejayaan Kerajaan Islam Aceh, Aceh menjadi pusat kegiatan intelektual. Selama abad ini, beberapa sarjana dari negara lain datang untuk belajar ke Aceh. Seorang ulama terkenal Syekh Muhammad Yusuf al-Makkasari (1626-1699), salah seorang ulama tersohor di waktunya itu di kepulauan Melayu, pernah belajar di Aceh.³⁷ Syekh Burhanuddin dari Minangkabau yang kemudian menjadi ulama terkenal dan menyebarkan Islam di Ulakan mendirikan surau di Minangkabau,³⁸ juga pernah belajar di Aceh di bawah bimbingan Syekh ‘Abd al-Rauf al-Singkili.

Pada masa selanjutnya, ketika terjadi kemunduran dalam bidang ekonomi dan politik di kesultanan Aceh, perhatian ulama Aceh dengan ilmu-ilmu agama tidak berkurang.³⁹ Dayah melanjutkan memenuhi kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan. Sebelum kedatangan Belanda, dayah-dayah di Aceh masih sering dikunjungi oleh masyarakat dari luar Aceh. Daud al-Fatani dari Pattani (sekarang satu wilayah di Thailand), yang kemudian dikenal sebagai ulama terkemuka, murid Muslim dari Asia Tenggara di Mekkah juga pernah mengunjungi Aceh sekitar tahun 1760-an. Dia belajar di Aceh selama dua tahun dengan Muhammad Zain al-Faqih Jalal al-Din al-Ashi.⁴⁰ Muhammad Zainal al-Faqih ini adalah pemimpin dayah di Aceh dan penulis dua kitab yang sangat terkenal, yaitu *Kashf al-Kiraam fi Bayan al-Nikayat fi Takbirat al-Ihram* dan *Talkhis al-Falah fi Bayan al-Tahlaq wa al-Nikah*.⁴¹

Dari sejak Hamzah Fansuri sampai kedatangan Belanda, ada 13 ulama dayah yang menulis kitab; karya yang ditulis jumlahnya 114 kitab.⁴² Dari kitab-kitab tersebut terdiri dari berbagai subjek, seperti tasawuf, kalam, logika, filsafat, fiqh, hadits, tafsir,

³⁷Marting Van Bruinessen, “The Origins and Development of the Naqshabandi Order in Indonesia,” *Der Islam*, No. 67 (1990), h. 157. Bruinessen mencatat bahwa silsilah Yusuf dari berbagai cabang tarekat sebagaimana ditegaskan dalam kitabnya *Risalah Safinat al-Najah* salah satu tarekat yang pernah ia pelajari adalah tarekat al-Qadiriyyah yang dipelajarinya di Aceh. Muhammad Yusuf, yang datang dari Mekkah, kemudian mengabdikan pada Sultan Agung Tirtayasa Kerajaan Muslim Banten. Maulana Yusuf ditetapkan sebagai panglima Perang Banten ketika VOC menyerang Kerajaan Banten. Karena keterlibatannya dalam perang tersebut, akhirnya ia ditangkap oleh Belanda. Karena keterlibatannya dalam perang tersebut, akhirnya ia ditangkap oleh Belanda dan pada 1683 diasingkan ke Sri Lanka dan kemudian ke Cape Town di Afrika Selatan.

³⁸Taufik Abdullah, “The Pesantren in Historical Perspective,” dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (eds.), *Islam Society in Southeast Asia*, (Singapore: Institute of South East Asian Studies, 1988), h. 986. Taufik Abdullah, “The Pesantren in Historical Perspective.

³⁹ Hoesein Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-Bahan yang Terdapat dalam Karya Melayu*, Teuku Hamid (terj.), (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pembangunan Pemensiunan Daerah Istimewa Aceh, 1983), h. 35.

⁴⁰ H. W. Shaghir Abdullah, *Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani: Ulama dan Pengarang Terulung Asia Tenggara*, (Kuala Lumpur: Hizbi, 1990), h. 32.

⁴¹Alyasa’ Abubakar

⁴²Untuk lebih jelas mengenai pengarang dan kitab-kitab, lihat Alyasa’ Abubakar dan Wamad Abdullah, “Manuskrip Dayah Tanoh Abee, h. 35-40.

akhlak, sejarah, tauhid, astronomi, obat-obatan, dan masalah lingkungan. Menurut al-Attas, bahasa Melayu juga dikembangkan pada abad-abad tersebut. Hamzah Fansuri (1510-1580) merupakan seorang pioner dalam perkembangan bahasa ini -secara rasional dan sistematis- serta dia sendiri menggunakannya dalam bidang filsafat.⁴³ Karya tentang fiqh terdiri dari beberapa topik, seperti ibadah, warisan, perkawinan, ekonomi (mu'amalah), dan politik (siyasah). Hal ini dapat dipahami jika terdapat studi hukum kewarisan menurut fiqh maka perlu mempelajari matematika meskipun masih dasar sekali. Hal ini berarti mempunyai dasar matematika. Karya-karya tentang ilmu politik ditawarkan dalam diskusi tentang kegiatan pemerintahan dan menjelaskan syarat-syarat untuk bisa menempati posisi sultan atau seorang menteri. Seperti misalnya, Jalaluddin al-Tursani, dalam bukunya yang berjudul *Safinat al-Hukkam*, menjelaskan hak-hak dan kewajiban sultan dan para menteri.

Pada masa kesultanan, beberapa kitab ulama dayah masih digunakan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di kepulauan Melayu -terutama di Aceh- untuk para murid pemula; karya-karya ini termasuk *Masail Muhadi* dan *Kitab Lapan*. Kedua kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu agar mudah dipahami, khususnya bagi murid yang tidak bisa membaca bahasa Arab dengan lancar, tetapi mengerti sampai tingkatan tertentu saja.

2. Peran Dayah dalam Melawan Penetrasi Penjajah

Ketika Belanda ke Aceh, terdapat beberapa dayah yang telah berdiri di kawasan tersebut. Ketika perang meletus, dayah memainkan peranan penting dalam perlawanan rakyat Aceh. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab pertama, sultan dan para *uleebalang* tidak sanggup menjalankan roda kepemimpinan, jadi para tentara ingin pemimpin lain untuk melanjutkan perlawanan dalam rangka mempertahankan tanah air mereka. Selain itu, Teuku Panglima Polem membujuk Tgk. Abdul Wahab Tanoh Abee untuk membangkitkan semangat rakyat untuk ikut berperang. Dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh Teuku Panglima Polem dan beberapa *uleebalang* yang masih ingin melanjutkan peperangan, Tgk. Chik Tanoh Abee mengatakan bahwa ia setuju dengan gerakan ini jika para *uleebalang* yang mengambil harta rakyat dengan cara tidak adil, maka ia menginginkan mereka untuk mengembalikan harta tersebut; sebelum berperang melawan musuh, mereka harus membersihkan diri mereka dari ketidakbenaran. Jika tidak, maka dia tidak ingin terlibat dalam peperangan ini dan murid-muridnya tidak akan diizinkan juga.⁴⁴

Dalam pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa, sementara itu beberapa tentara yang ingin melanjutkan perang selanjutnya mencari pemimpin yang lain. Setelah diskusi panjang lebar, salah satu kelompok tentara, yang dikenal dengan

⁴³Syed M. Naquib al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Bandung: Mizan, 1990), h. 68.

⁴⁴Ismail Yacob, *Teungku Tjik Di Tiro*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1960), h. 40.

utusan *Gunong Biram*, pergi ke satu dayah di Tiro⁴⁵ untuk mencari seorang pemimpin. Utusan ini diterima oleh Tgk. Chik Dayah Cut, pada saat itu menjabat sebagai pimpinan Dayah Cut. Tgk. Chik Dayah mendukung keinginan utusan *Gunong Biram* dan dalam satu pertemuan yang dilaksanakan dengan beberapa muridnya untuk memecahkan masalah yang diajukan oleh utusan tersebut. Akhirnya, Tgk. Muhammad Saman (yang kemudian dikenal dengan sebutan Tgk. Chik Di Tiro), salah seorang guru di dayah tersebut dipilih sebagai pemimpin pasukan. Untuk meyakinkan rakyat agar ikut dengan Saman dan memberi dukungan moril dan spirituil, Tgk. Dayah Cut menyelenggarakan dua pertemuan akbar bertempat di dua dayah yang berbeda di Tiro; pertemuan pertama yang dilaksanakan di Dayah Krueng dan yang kedua di Dayah Lampoh Raya. Untuk mendapatkan senjata dibangun sebuah “*teumpeun*” (pabrik senjata tradisional) yang dibangun di Tiro yang memproduksi berbagai senjata tradisional, seperti *rencong* (pisau rakyat Aceh) dan pedang-pedang.⁴⁶

Sebelum menjadi komandan, Tgk. Muhammad Saman pernah mendapatkan pengalaman kemiliteran ketika bersama murid-murid Dayah Lamkrak dalam menghadapi garnisun Belanda di Lamkrak, Aceh Besar. Pengalaman ini menjadi aset yang penting terhadap Tgk. Muhammad Saman dan menjadi mudah baginya untuk mendapatkan dukungan dari Aceh Besar. Semua teman-temannya bergabung dengannya ketika perang melawan garnisun Belanda, mencari makanan dan merekrut masyarakat. Setelah masa persiapan dan konsultasi, seluruh anggota dayah di Aceh Besar terlibat dalam perang, termasuk juga beberapa pimpinan dayah, seperti Tgk. Chik Tanoh Abee dan Tgk. Chik Kuta Karang, bergabung menjadi staf Tgk. Muhammad Saman. Tgk. Dayah Krueng Kale mengirim murid-muridnya untuk berperang dalam pasukan Tgk. Muhammad Saman. Dayah Tiro sendiri dijadikan sebagai markas besar oleh Tgk. Muhammad Saman. Setelah ia wafat, dayah ini tetap dijadikan sebagai markas besar militer oleh keturunannya yang melanjutkan berperang hingga tahun 1910.

Hal ini menunjukkan bahwa dayah, apa pun bentuk namanya di tempat lain, telah menjadi pusat perlawanan dalam menghadapi penetrasi penjajah. Hal serupa juga terdapat di Pattani, Thailand, *zawiyah* menjadi pusat latihan bagi para kesatria untuk mencapai kemerdekaan.⁴⁷ Ketika Diponegoro melawan penjajah Belanda, seluruh murid pesantren Pabelan di Jawa Tengah ikut terlibat. Pesantren ini merupakan markas Kiyai *Maja*, salah satu wakil Diponegoro.⁴⁸

⁴⁵*Ibid.*, h. 42.

⁴⁶Ismail Yacob, *Teungku*, h. 45.

⁴⁷A. Hasjmy, “Pokok-Pokok Pikiran Tentang Fungsi dan Eksistensi Dayah dalam Sejarah Perjuangan Bangsa,” dalam *Hasil-Hasil Mubes III PB Inshafuddin*, (Banda Aceh: P.B. Inshafuddin, 1986), h. 102.

⁴⁸Komaruddin Hidayat, “Pesantren dan Elit Desa”, dalam Dawan, Rahardjo (ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren*, (Jakarta: P3M, 1985), h. 78.

Apa yang terdapat dalam *Hikayat Prang Sabi*, yang kemudian menjadi suatu kekuatan yang membangkitkan semangat rakyat Aceh terjun ke perang suci untuk mempertahankan tanah Aceh merupakan salah satu indikasi lain yang menjelaskan keterlibatan ulama dayah dalam perang ini. Dalam konteks ini, indikasi pertama menyatakan bahwa *Hikayat Prang Sabi* disusun dalam bahasa Aceh yang sering dipakai oleh ulama dayah. Dalam hal ini, dalam satu dayah biasanya dipakai tiga bahasa, yaitu bahasa Aceh, Melayu, dan Arab. Kebanyakan kitab Qur'an dan Hadits. Meskipun demikian, bahasa Aceh dan Melayu senada juga dapat ditemui dalam kitab *Hikayat Prang Sabi*. Kata-kata yang dipakai adalah bahasa Aceh, meskipun kadang-kadang memakai bahasa Melayu, dan di tempat lain di gunakan bahasa Arab, terutama dalam hal mengutip dari Al-Qur'an dan al-Hadits. Tgk. Chik Pante Kulu merupakan salah seorang pengarang yang dikenal banyak memberikan kontribusi dalam kegiatan tersebut. Ia sendiri pernah belajar di dayah Tgk. Dayah Cut.

3. Dayah sebagai Agen Pembangunan

Dayah telah banyak mengabdikan kepada rakyat Aceh terutama dalam hal menghasilkan pemimpin masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Orang-orang tersebut telah memainkan peran yang penting dalam membina komunitasnya dalam bidang keyakinan dan praktik agama. Meskipun demikian, dayah juga mendapatkan kritik oleh para intelektual karena hanya menghasilkan lulusan dalam bidang agama dan tidak ada keahlian lain yang berguna. Berdasarkan kritik tersebut, dayah-dayah seharusnya menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian lain sebagai tambahan belajar agama, khususnya bagi siapa yang tidak ingin melanjutkan studinya hingga menjadi seorang ulama. Karena tuntutan pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang memerlukan keahlian untuk bekerja. Berdasarkan pada kenyataan ini, dayah-dayah melengkapi lulusannya dengan berbagai keahlian yang nantinya mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebaliknya, mereka tidak akan mampu mencari pekerjaan dan akan menjadi pekerja bawahan, dan untuk menjadi kelas menengah atau kelas atas akan tetap tertutup bagi mereka. Kenyataan ini adalah sebagai tuntutan perubahan ekonomi dan sosial dalam masyarakat Indonesia, umumnya suatu keadaan yang sama terjadi di Aceh.

Beberapa dayah mencoba untuk mengajarkan berbagai keahlian bagi murid mereka. Bagaimanapun, inisiatif ini masih berada pada tahap terbatas. Beberapa program tidak diatur dengan baik, bahkan ada insidental, dan jenis keahlian yang dilatih pun masih tergantung pada tenaga pengajar yang tersedia. Dalam hal ini, apa yang terjadi di Dayah Darussalihin Lam Ateuk, Aceh Besar dapat dijadikan sebagai contoh, yang mana murid-murid dayah tersebut belajar menjahit. Anak laki-laki diajarkan menjahit kopiah⁴⁹ sementara murid perempuan diajarkan menjahit pakaian

⁴⁹Kopiah adalah topi yang berwarna hitam yang dipakai oleh sebagian rakyat Indonesia, khususnya oleh Muslim ketika sembahyang.

wanita. Di beberapa dayah, terdapat koperasi murid yang diatur meskipun tidak secara profesional.

Dalam beberapa waktu, beberapa lulusan dayah menjadi pemimpin formal yang duduk di kursi pemerintahan; di lain pihak ada juga yang menjadi pemimpin informal. Biasanya mereka aktif dalam pembangunan masyarakat. Tradisi ini berlangsung sampai hari ini, meskipun lulusan dari sekolah lain (madrasah dan sekolah umum) juga aktif dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kedatangan Belanda ke Aceh, beberapa ulama yang tamat dari dayah juga aktif dalam bidang ekonomi, khususnya bidang pertanian. Sebagai contoh, Tgk. Chik di Pasi memimpin masyarakat membangun sistem irigasi, seperti yang dilakukan oleh Tgk. Chik di Bambi dan Tgk. Chik di Rebee.⁵⁰ Partisipasi ulama dalam kegiatan tersebut dilakukan secara suka rela dan tidak di bayar sama sekali. Sekitar tahun 1963, Tgk. Daud Beureueh menjadi motor penggerak pembuatan jalan-jalan, pengadaan jembatan, membangun jaringan irigasi dan pembersihan irigasi yang telah lama.⁵¹ Sudah menjadi kelaziman bahwa setiap ada proyek pembangunan masjid, pasti dipimpin oleh ulama dayah, atau paling tidak pada tahap permulaan dimotivasi oleh mereka. Seperti Tgk. Abdullah Ujong Rimba yang memimpin dua pembangunan masjid dalam masyarakatnya di salah satu desa di Pidie. Tgk. Keumala memimpin dewan pengurus pembangunan masjid dari jauh: dia sendiri tinggal di Medan -yang jauhnya sekitar 500 km dari kampungnya dan berbeda provinsi- meskipun demikian, dia menjadi ketua dewan pengurus di kampungnya, Seunuddon, Aceh Utara.

Tidaklah terlalu sulit dimengerti mengapa ulama dayah sering dipilih sebagai pemimpin dan organisatoris. *Pertama*, mereka sendiri dengan tekun terlibat secara sukarela jika mereka sepakat bahwa kegiatan-kegiatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan tujuan agama. Menurut Habib Chirzin, hal demikian benar, karena hampir semua lulusan dayah, seperti juga terjadi pada para lulusan madrasah.⁵² Perbedaannya, lulusan sekolah umum ataupun madrasah-madrasah kebanyakan berorientasi pada materi meskipun mereka adalah para elit Muslim. Sebagaimana yang diteliti oleh Ibrahim Husein,⁵³ perilaku elit Muslim kontemporer yang datang dari madrasah dan sekolah umum menderita krisis idealita. Mereka sibuk dengan dirinya masing-masing dan tanpa memperdulikan masyarakat lain.⁵⁴ Menurut Ali Audah, dewasa ini, krisis tersebut menjadi krisis nasional, yang para elit Muslim tidak mau

⁵⁰ Baihaqi A. K, "Ulama dan Madrasah di Aceh," dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 117.

⁵¹ James T. Siegel, *The Rope of God*, (Los Angeles: University of California Press, 1969), h. 61.

⁵² M. Habib Chirzin, "Tradisi Pesantren: Dari Harmonitas ke Emansipasi Sosial," *Pesantren*, Vol. 5, No. 4 (1988), h. 30.

⁵³ Ibrahim Husein adalah Rektor IAIN Ar-Raniry pada waktu itu dan salah seorang anggota MUI Provinsi Aceh.

⁵⁴ Arfendi A. R., "Elit Menuju Kesamaan Orientasi", *Panjimas*, No. 443, (September 1984), h. 16.

bekerja keras memperbaiki generasi muda. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Dia menambahkan betapa jarang lulusan universitas yang menjadi guru hanya karena gaji sedikit.⁵⁵ *Kedua*, sikap para ulama dayah dirasa oleh masyarakat lebih dipercaya ketimbang pemimpin sekular. Ulama dayah dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang sesuai apa yang dikatakan dengan apa yang mereka lakukan. *Ketiga*, mereka juga mempunyai kemampuan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka bisa melakukan hal tersebut karena mereka memiliki pengetahuan agama yang digunakan untuk memperingatkan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Jelasnya, simbol-simbol agama, menjadi perhatian dan tujuan kuat yang mempengaruhi dan memotivasi masyarakat di Aceh.

Lulusan dayah telah menunjukkan bahwa mereka memiliki perhatian yang besar terhadap masyarakat dan berbagai kepentingan. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa selama *meudagang* di dayah, mereka melewati pengalaman baru yang berbeda dengan pengalaman mereka selama berada di kampung halaman. Jadi lulusan dayah menjadi seorang yang mempunyai dua latar belakang kultur yang berbeda, di satu pihak realitas sosial yang mereka temui ketika berada di kampung halaman dan di pihak lain sesuatu yang baru yang mereka pelajari di dayah. Dengan demikian, mereka menemukan bagaimana konsep yang ideal untuk membimbing masyarakat, yang berbeda dengan apa yang terjadi dalam keseharian masyarakat Aceh. Oleh karena itu, dia menemukan dengan sendirinya sebuah cara mereformasi masyarakatnya. Jadi, lulusan dayah sebagai suatu kelompok ingin melihat diri sendiri sebagai pemain peran penting dan pembaharu. Penjelasan ini menunjukkan bahwa mengapa suatu hal yang sangat beda perjalanan sejarah, sejarah rakyat Aceh di mana ulama memimpin gerakan pembaharuan. Meskipun mereka tidak berhasil apa yang diharapkan, gerakan pembaharuan ini akan selalu menjadi satu kontribusi yang besar dalam masyarakat Aceh, khususnya bagi para petani di daerah pedalaman.

Sebagai agen pembangunan, lulusan dayah nampaknya memainkan peran intelektual yang telah membawa ide-ide segar kepada masyarakat. Dengan Islam, mereka membentuk tali persaudaraan di kalangan masyarakat Aceh, yang berlandaskan pada konsep persamaan manusia dalam agama, yang dalam masyarakat mereka menemukan adanya pikiran memandang rendah satu sama lain. Akhirnya, para pemimpin ini mampu menyatukan dari berbagai kelompok dalam kampung.

4. Dayah sebagai Sekolah bagi Masyarakat

⁵⁵*Ibid.*

Belajar di dayah tidak membutuhkan banyak uang. Inilah yang menjadi faktor penting bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Rakyat bisa belajar di dayah meskipun sangat miskin. Umumnya, dayah-dayah tidak membebankan murid-murid untuk membayar uang pendidikan. Sebagaimana dilaporkan oleh Kustadi Suhendang, 47 persen dayah-dayah tidak memungut uang pendidikan; 20 persen memberlakukannya, tetapi tidak mewajibkan dengan jumlah tertentu.⁵⁶ Bagi murid yang fakir miskin, dayah dengan sendirinya menyediakan makan, yang diberikan oleh Teungku (pimpinan dayah) atau dari masyarakat yang selalu siap membantu.⁵⁷ Dewasa ini, jika beberapa dayah yang meminta biaya pendidikan biasanya tidak terlalu banyak. Murid-murid yang tidak punya uang biasanya bekerja di sawah atau kebun milik dayah atau tinggal di tetangga-tetangga dayah.

Para murid tidak terlalu menuntut banyak permintaan administrasi. Guru-guru tidak terlalu menuntut banyak permintaan yang berhubungan dengan kebutuhan materi. Kebutuhan sehari-hari mereka sangat sederhana. Guru-guru, khususnya pimpinan dayah, biasanya mereka mempunyai penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Beberapa dari mereka ada yang menerima shadaqah, zakat dari masyarakat atau uang yang diberikan oleh masyarakat ketika memberi khutbah Jum'at atau memberi ceramah ketika perayaan Maulid Nabi. Telah menjadi kebiasaan bagi orang tua murid untuk membawa sesuatu kepada guru dayah ketika membesuk anak-anak mereka. Asisten guru dipilih dari murid, mereka bekerja secara sukarela tanpa bayaran. Mengajar kawan sebaya mereka adalah salah satu proses yang dilalui ketika belajar di dayah, dan kegiatan ini dipandang sebagai ibadah. Keadaan inilah yang menjadikan agak mudah bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan belajar.

Tidak seperti halnya dayah, sekolah meskipun bukan sekolah dasar dan madrasah mewajibkan murid-murid untuk biaya pendidikan.⁵⁸ Sekolah-sekolah ini mewajibkan anak didiknya memakai seragam, hal mana menjadi berat bagi yang miskin untuk melakukannya, dan juga mereka harus membeli barang (termasuk buku-buku). Karena banyak tuntutan pengeluaran uang, bagi masyarakat menjadi alasan mengapa mereka memilih dayah sebagai tempat belajar. Lebih dari itu, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, belajar di dayah sangat komprehensif ketimbang belajar di tempat lain; karena dayah tidak hanya menawarkan materi agama Islam tetapi juga bimbingan spiritual dan latihan fisik. Sebagai guru, *teungku*, bukan hanya bertanggung jawab dalam hal mengajar, namun juga berfungsi sebagai penasehat, pelatih,

⁵⁶Kustadi Suhendang, *Laporan Hasil Penelitian Studi tentang Dayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: P3KI berkerjasama dengan BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1992), h. 40; namun demikian, Dayah Darul Ulum MTI Tanoh Mirah tidak membebankan murid-muridnya dalam bentuk apa pun, kecuali apa yang mereka butuhkan. Lihat U.A "Pesantren Darul Ulum MTI Tanoh Mirah Prihatin", *Waspada*, 12 Juli, 1984.

⁵⁷Anwar Yusuf dan Hasbi Abdullah, *Laporan tentang Perkembangan Dayah Darussalihin*, (t.n.p. 1987), h.4.

⁵⁸Dalam satu madrasah, meski murid kelas dasar juga harus membayar biaya pendidikan.

pembimbing, dan penolong. Hubungan antara murid dan guru lebih pada hubungan personal ketimbang hubungan birokrasi.

B. Komitmen Ulama terhadap Sosial-Politik Keacehan

Komitmen sosial-politik ulama sangat berkaitan dengan sejarah Aceh, yang mana dalam waktu yang cukup lama sangat dipengaruhi oleh Islam. Jika kita setuju dengan berdirinya Kerajaan Peureulak pada abad kesembilan, maka Aceh telah dipengaruhi oleh Islam selama sepuluh abad ketika Belanda menduduki Aceh. Sejak Kerajaan Peureulak (sekarang menjadi kecamatan di Aceh Timur) muncul sebagai sebuah kerajaan yang berkuasa telah menunjukkan hubungan baik antara sultan dan ulama,⁵⁹ baik itu urusan dunia atau hubungan agama dan spiritual. Pada masa kejayaan Kerajaan Islam Aceh, ciri khas yang saling melengkapi pada dua kekuatan lembaga tersebut menjadi sangat berarti: sebagaimana dikatakan dalam pepatah (*hadih maja*) “*Adat Bak Po-teumereuhom, Hukum Bak Siah Kuala*”⁶⁰ (ketentuan hukum adat pada sultan dan ketentuan agama ada pada ulama).

Uleebalang menjadi bagian dari pemerintahan, dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan sultan di daerah mereka masing-masing. Namun demikian, para *uleebalang* di luar Aceh *Tiga Sagi* (Segitiga Aceh) mempunyai otonomi dalam mengatur wilayah mereka masing-masing. Para *uleebalang* tersebut hanya diwajibkan membayar pajak kepada sultan. Oleh sebab itu, beberapa penulis menyatakan bahwa ada tiga kelompok kekuatan di Aceh: sultan, ulama, dan *uleebalang*,⁶¹ kemudian jika kehidupan keagamaan di Aceh terancam, maka ulama dengan cepat maju ke depan untuk memberi perlawanan.

Ketika sultan menyatakan bahwa ia tidak sanggup lagi untuk menghadapi invasi Belanda, ulamalah dengan sungguh-sungguh melanjutkan perjuangan dalam berperang mempertahankan agama dan tanah air mereka. Ulama turun ke gelanggang untuk memimpin rakyat dengan semangat mereka dalam rangka melindungi struktur sosio-politik masyarakat Aceh. Invasi Belanda menurut ulama sangat mengancam agama. Daerah Aceh -yang seratus persen Muslim- Islam merupakan pandangan hidup dan semenjak masa kesultanan telah menjadi ideologi negara.⁶² Menurut pendapat ulama, Islam tidak hanya terdiri dari urusan ibadah belaka, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga dan sistem; karena itu pemerintah harus dijalankan oleh penduduk sendiri. Negara juga harus memiliki kejelasan wilayah kekuasaannya.

⁵⁹A. Hasjmy, “Adakah Kerajaan Islam Peureulak Negara Islam Pertama di Asia Tenggara”, dalam A. Hasjmy (peny.), *Sejarah masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. ALma’arif, 1989), h. 143-172.

⁶⁰Lihat M. Junus Djamil, *Gajah Putih Iskandar Muda*, (Kutaraja: Lembaga Kebudayaan Aceh, t.th), h. 118.

⁶¹Lihat Siegel, *The Rope of God*, h. 9; Eric Eugene Morris, *Aceh dan Politics*, h. 24-42; Nazaruddin Sjamsuddin, *The Republican Revolt*, h. 16.

⁶² Siegel, *The Rope of God*, h. 39.

Dengan demikian, agresi penjajah pemerintah Belanda telah melanggar sistem-sistem yang mana diyakini bagian dari ajaran Islam.

Setiap agresi pasti akan menghasilkan kekerasan demi kekerasan.⁶³ Taktik yang dipakai oleh Belanda untuk menundukkan orang Aceh adalah dengan menggunakan senjata membunuh rakyat yang melawan, dan bahkan mengeksekusi para ulama yang menolak untuk bekerja sama dengan mereka.⁶⁴ Dengan adanya eksekusi terhadap para ulama itu, Tgk. Kuta Karang, salah satu ulama terkenal yang mempunyai komitmen terhadap sosio-politik dan kesejahteraan rakyat Aceh, mengingatkan rakyat Aceh dengan menyebarkan selebaran yang menyatakan bahwa invasi Belanda akan merusak kehidupan masyarakat Aceh, baik itu nyawa maupun harta. Menurutnya, masyarakat telah diperbudak, anak-anak telah mengabdikan kepada Belanda, orang-orang tua bekerja sebagai tukang kebun, remaja putri dijadikan sebagai gundik, dan perempuan-perempuan tua sebagai pelayan.⁶⁵ Pendapat-pendapat tersebut mungkin dibesar-besarkan karena Tgk. Kuta Karang menulis kisah yang agak detail sehingga mampu membangkitkan emosi rakyat Aceh. Meskipun demikian, banyak bukti yang mendukung kebenaran selebaran-selebaran Tgk. Kuta Karang tersebut. Misalnya, masyarakat yang disebut *kettingberen* (buruh kasar) telah dikirim ke Aceh diperlakukan bagaikan binatang pembawa beban⁶⁶ dan kadang-kadang Belanda menyiksa mereka.⁶⁷

Pengaruh-pengaruh yang menguntungkan agresi Belanda telah diperlihatkan dalam sejarah perang Belanda-Aceh. Dalam usaha mereka untuk menguasai Aceh, Belanda mencoba untuk memisahkan kekuatan-kekuatan tradisional sultan, *uleebalang*, dan ulama dengan menawarkan “pemerintahan sendiri” (*self governing*) bagi para *uleebalang* dengan cara *konteverklaring* (deklarasi singkat) pada tahun 1874. Cara ini menghasilkan hubungan yang tidak harmonis antara *uleebalang* dan ulama, yang akhirnya terjadi konflik berdarah di antara mereka selang beberapa waktu setelah Indonesia merdeka pada 1945. Pada dasarnya, perselisihan ini merupakan hasil rekayasa Belanda yang dianjurkan oleh Snouck Hurgronje pada akhir abad ini.⁶⁸

⁶³ Peter Marsh, “Agression,” dalam William dan Tome Batlmore (eds.), *The Dictionary of Twentieth Century Social Thought*, (London: Blackwell Publishers, 1993), h. 9.

⁶⁴ Paul Van’t Veer, *Perang Belanda di Aceh*, h. 199.

⁶⁵ E. Gobebe dan Adrianse, *Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. Sukarsih (terj.), (Jakarta: INIS, 1991), h. 109.

⁶⁶ Alfian, *Perang di Jalan Allah*, h. 46-47.

⁶⁷ Paul Van’t Veer, *Perang Belanda*, h. 199.

⁶⁸ Harry J. Benda, *The Crescent and Rising Sun: Indonesia Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*, (The Hague dan Bandung: Van Hoeve, 1958), Bab I. Snouck Hurgronje adalah Sarjana Belanda yang bekerja pada Hindia Belanda (Indonesia) sebagai penasehat dalam urusan-urusan pribumi dari 1889 sampai 1906. Setelah kembali ke Netherlands hingga meninggal, dia tetap melanjutkan memberikan nasehat pada politik kolonial sebagai penasehat bagi menteri kolonial, khususnya dalam bidang pendidikan dan agama. Lihat Karel Steenbrink, *Dutch Colonialism and Indonesian Islam: Contact and Conflicts 1596-1950*, Jan Steenbrink dan Henry Jansen, (terj.) (Amsterdam: Rodopi, 1993), h. 88.

Belanda menyingkirkan sultan sebagai simbol pemimpin bagi rakyat Aceh dari posisinya dalam struktur kekuasaan. Menurut pendapat Snouck Hurgronje, peran ulama sangat signifikan, karena kekuasaan mereka harus dibatasi pada urusan-urusan keagamaan saja. Para *uleebalang*, di bawah pemerintah kolonial, yang mengatur daerah Aceh, oleh Belanda diberikan otoritas sebagai kepala suku adat. Lebih lanjut, daerah Aceh terbagi dalam dua bentuk administrasi; wilayah-wilayah di sekitar ibukota Kuta Raja yang berjumlah 50 *uleebalang* dipimpin langsung oleh Belanda, sementara daerah lain yang berjumlah kira-kira 100 *uleebalang*, dipimpin oleh *zalfbestuur*.⁶⁹

Dengan cara-cara di atas, Belanda berhasil memecah belah persatuan rakyat Aceh, yang pada gilirannya menyebabkan adanya konflik yang berkelanjutan antara kelompok yang pro-sultan dan pro-*uleebalang*. Di antara para *uleebalang*, ada yang sudah mempersiapkan untuk merebut *korteverklaring*, dan ada juga beberapa yang masih setia pada sultan. Kendatipun demikian, sultan memperoleh dukungan yang sangat kuat dari ulama, hal mana sangat anti terhadap Belanda, dengan begitu, mereka memimpin perlawanan terhadap mereka. Bersama dengan para aristokrat yang masih mendukung sultan, para ulama ikut berperang yang dilandaskan pada ajaran agama. Dengan menggunakan strategi perang gerilya, mereka terus-menerus berjuang dalam beberapa tahun untuk menghalangi Belanda yang membawa agama dalam kontrol mereka selama sepuluh tahun setelah sultan ditawan. Dengan demikian, Belanda tidak berhasil memerintah di Aceh sampai akhir tahun 1981, selama 45 tahun setelah meletus peperangan.⁷⁰

Pengaruh yang paling besar terhadap pasifikasi Belanda yang sangat dikhawatirkan oleh ulama adalah kebijakan dengan membuka pintu pendidikan sekular untuk rakyat Aceh. Selanjutnya para ulama menyadari bahwa Belanda telah menjauhkan generasi muda Aceh dari pengaruh mereka. Tentu saja, mereka sangat gelisah dengan kenyataan bahwa beberapa ribu anak Aceh sudah terdaftar di sekolah sekular dari berbagai jenis dan tingkatan. Yang menambah menyakitkan lagi sebagian anak-anak, termasuk anak-anak mereka, dipaksa oleh Belanda, begitu juga *uleebalang* lokal, untuk masuk ke sekolah sekular semi-modern. Penting dicatat bahwa ulama Aceh memperlihatkan perhatian serius dalam bidang sosial politik di daerah mereka. Pada tahun 1920-an, beberapa ulama mendirikan satu cabang Sarekat Islam (SI) di Aceh. Tujuan mereka adalah menyatukan rakyat Aceh dalam melawan para penjajah dan membangun kembali kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi dan intelektual. Namun demikian, Belanda melarang organisasi tersebut, menuduh anggota-anggotanya sebagai komunis, dan mencoba untuk menangkap mereka. Tgk. Syekh Abd al-Hamid, dikenal sebagai Ayah Hamid, salah seorang anggota organisasi ini, yang berhasil melarikan diri ke Penang, setelah itu, ia bergegas ke Mekkah. Di

⁶⁹A. J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan*, ('S-Gravenhage: Ban Hoeve, 1949), h. 7

⁷⁰Nazaruddin, *The Republican Revolt*, h. 17.

samping melaksanakan ibadah haji, di sana ia juga bertemu dengan Muslim dari berbagai negara yang pada gilirannya menumbuhkan kesadarannya tentang situasi dunia Islam. Setelah itu, dia mencoba untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat di Aceh dengan mengirim surat kepada ulama-ulama di Aceh. Untuk bisa lepas dari sensor Belanda, secara regular, ia mengirimkan koran harian di Mekkah, yang berbahasa Arab, kepada teman dekatnya di Aceh, Tgk. Abdullah Ujong Rimba,⁷¹ melalui surat kabar tersebut ia tulis pesan-pesannya yang juga ditulis dalam bahasa Arab, di celah-celah di antara lembar-lembar koran tersebut. Dia menekankan bahwa diperlukan suatu pembaharuan pendidikan Muslim, yang dititikberatkan pada kegiatan politik bagi Muslim. Dia menggambarkan bagaimana semangat kemerdekaan yang terjadi di negeri-negeri Muslim lain, yang hal itu bisa terjadi juga di Aceh. Ide-ide tersebut didiskusikan oleh para pemimpin Aceh dan dihadiri oleh ulama seperti Tgk. M. Daud Beureueh. Hasil dari pertemuan tersebut, didirikannya sekolah Islam modern di Aceh, yang di sana diajarkan pelajaran sekular seperti juga subjek agama, demikian juga mereka telah menggunakan sistem kelas seperti sistem Barat, meskipun dalam beberapa hal secara informal *setting* dayah juga diberlakukan. Dengan ini diharapkan sekolah-sekolah akan mampu mendidik rakyat memiliki kekuatan untuk meraih kemerdekaan.

Penting dicatat bahwa beberapa *uleebalang* menunjukkan sikap simpati terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh penjajah kepada rakyat jelata, dan oleh sebab itu, mereka terlibat secara aktif dalam pergerakan nasional Indonesia. Teuku Nyak Arief dan Teuku Muhammad Hasan merupakan dua orang di antara mereka. Teuku Nyak Arief telah menunjukkan rasa simpatik dengan pergerakan nasional Indonesia, meskipun masih sebagai anggota dalam Dewan Rakyat (*Dutch Volksraad*). Dia secara aktif mendukung setiap kegiatan-kegiatan sosial dan organisasi-organisasi keagamaan, khususnya mengenai lembaga-lembaga pendidikan mereka. Teuku Muhammad Hasan adalah wakil pertama dari Aceh pada organisasi Muhammadiyah, sebuah organisasi modern Muslim yang mengkhususkan diri dalam bidang pembaharuan agama dan sosial-pendidikan. Teuku Johan Syah dengan penuh semangat mendukung pendirian madrasah al-Muslim Peusangan.⁷² Teuku Fakeh Mahmud, Teuku Muda Dalam dan Teuku M. Ali, semuanya berasal dari Pidie, adalah anggota-anggota Jam'iyat al-Diniyah yang mendirikan Madrasah Sa'adah 'Abadiyah di Sigli, Pidie.⁷³ Namun demikian, para *uleebalang* tersebut tidak dapat menghilangkan rasa tidak puas di kalangan petani terhadap apa yang dilakukan oleh *uleebalang* sebagai satu kelompok. Sehingga hal itu merupakan ladang subur memunculkan ulama sebagai para pemimpin rakyat. Ketidakpuasan rakyat terhadap *uleebalang* adalah salah satu sebab mengapa ulama menerima dukungan yang sangat besar ketika mereka

⁷¹Abdullah Ujong Rimba, *Private Historical Note*, h. 80.

⁷²Ismuha, "Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap", *Sinar Darussalam*, No. 2 (1968), h. 43.

⁷³Abdullah Ujong Rimba, *Private Historical Note*, h. 83.

melancarkan pergerakan pembaharuan yang dimulai pada tahun 1920-an dan puncaknya pada 1930 ketika mereka mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

Nazaruddin Sjamsuddin menyebutkan bahwa pemberontakan yang meletus pada tahun 1953 adalah disebabkan oleh perhatian serius dari ulama⁷⁴ terhadap kondisi Aceh pada waktu itu. Sebagaimana warisan kesadaran sejarah dan keunikan budaya, sikap para pemimpin Aceh tersebut didasarkan pada situasi psikologi, keagamaan, dan kegiatan-kegiatan kultural mereka.⁷⁵ Dalam hal ini, berbagai pandangan muncul mengenai pemberontakan tersebut. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa pemberontakan ini terjadi sebagai kelanjutan konflik antara ulama dan *uleebalang*; pendapat ini sebagaimana dijelaskan oleh Ali Sastroamidjojo mengenai pemberontakan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu.⁷⁶ Pendapat lain dikemukakan oleh Feith, bahwa pemberontakan ini terjadi sebagai perluasan konflik antara Masyumi dan PNI.⁷⁷ Ini menunjukkan bahwa sangat masuk akal, adanya pendapat yang menganggap pemberontakan sebagai produk konflik antara Aceh dengan pemerintah pusat muncul dari kepentingan yang berbeda. Konflik antara ulama dan *uleebalang* tidak dapat dijadikan dasar yang kuat.

Dengan melacak biografi ulama yang terlibat dalam pergerakannya,⁷⁸ dan alasan-alasan mereka yang terlihat dari partisipasi dalam pemberontakan terhadap pemerintah pusat, menunjukkan bahwa pemberontakan ini diwarnai oleh agama. Cara-cara agama merupakan cara yang diyakini mampu menyelesaikan pemberontakan ini. Sebagaimana dinyatakan oleh Nazaruddin, “otonomi bagi ulama bukan merupakan pengaruh politik. Mereka menghormati otonomi hanya dalam rangka memelihara nilai-nilai agama rakyat, sebagai keyakinan mereka yang dalam.”⁷⁹

Setelah Tgk. Daud Beureueh turun gunung, dia melanjutkan kegiatannya dalam bidang keagamaan dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Program pertama yang dilakukannya adalah *pengajian*⁸⁰ di masjid, Al-A’la lil Mujahidin. Dia sendiri yang menjadi guru pada pengajian tersebut. Pengajian ini tidak menyajikan berbagai

⁷⁴Pada waktu itu, para pemimpin Aceh tidak semua dari golongan ulama dayah, karena di kalangan mereka terdapat lulusan dari madrasah atau sekolah umum yang oleh Nazaruddin disebut dengan *zu’ama*. Namun demikian, banyak dari mereka didominasi oleh ulama yang tidak setuju dengan pergerakan tersebut.

⁷⁵Sjamsuddin, *The Republican Revolt*, h. 39.

⁷⁶Kementrian Penerangan R.I., *Kemenangan dan Jawaban Pemerintah tentang Peristiwa Daud Beureueh*, (Jakarta: Kementrian Penerangan RI, 1953).

⁷⁷Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1968), h. 343-348.

⁷⁸Lihat Fachry Ali, “Teungku Beureueh dan Masyarakat Aceh Dewasa Ini,” *Panji Masyarakat*, No. 518, 1986; Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1992); James Siegel, *The Rope of God*, (Berkely: University of California Press, 1969); Nazaruddin Sjamsuddin, *The Republican Revol: A Study of the Acehnese Rebellion*, (Singapore: ISAS, 1985).

⁷⁹Nazaruddin Sjamsuddin, *The Republican Revolt*, h. 8.

⁸⁰ Pengajian adalah studi agama.

tingkatan kelas, akan tetapi, kegiatan ini sangat penting, sebab, dengan demikian, masyarakat bisa mempelajari agama Islam dan mempraktekkannya secara khusus tidak seperti sebelumnya. Semenjak terjadi pemberontakan, banyak kegiatan pendidikan terbengkalai, karena situasi yang tidak mendukung. Dengan diadakan pengajaran, banyak tokoh masyarakat Aceh, terutama Beureunuen dan sekitarnya, yang datang belajar pada Tgk. Daud Beureueh. Dengan pengajian tersebut, dia berkeinginan supaya rakyat menata kembali struktur kampung mereka, dan mengaktifkan pengajian di setiap kampung.

Tgk. M. Daud Beureueh sendiri membangun masjidnya, setelah ditinggalkan begitu lama ketika ia berada di gunung. Orang-orang kaya, baik itu dari kalangan pemerintah daerah dan pusat, juga ikut membantu tahap-tahap pembangunan masjid ini. Meskipun banyak bantuan dari berbagai kalangan, hingga ia meninggal pada tahun 1982, masjid ini belum selesai. Sebaliknya, bantuan yang diterima tidak digunakan untuk masjid ini saja, akan tetapi ia bagikan pada masjid lain yang ada di berbagai kawasan. Menurut Tgk. Mansur,⁸¹ Tgk. M. Daud Beureueh mendistribusikan bantuan untuk 14 pembangunan masjid di kawasan Pidie.

Sebagaimana dijelaskan oleh James Siegel, Tgk. M. Daud Beureueh menghabiskan masa hidupnya dengan mempersatukan rakyat dalam satu pertalian, yakni “pertalian Tuhan” (*the Rope of God*). Obsesi inilah yang selalu ia dengungkan kapan pun dan dimana pun.⁸² Apa yang dilakukan oleh Tgk. M. Daud Beureueh menandakan bagaimana obsesi ulama dalam mempersatukan umat melalui bingkai agama. Sekitar seratus ulama juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Daud Beureueh dalam mempersatukan umat di bawah warna Islam. Ajakan tersebut, selalu menitikberatkan pada pelaksanaan ajaran Islam yang baik dan benar. Seperti ajakan zakat, bahwa zakat merupakan satu cara dalam mengikat tali persaudaraan antar yang miskin dan kaya. Menggalakkan zakat tidak hanya melalui ajakan semata, tetapi para ulama terlibat langsung mengontrol kegiatan tersebut.

Dalam rangka pengawalan sosial-politik masyarakat Aceh, para ulama menggunakan berbagai media. Dakwah merupakan salah satu cara yang paling efektif. Sampai sekarang, di Aceh, dakwah masih menjadi cara yang paling menarik dalam mensosialisasikan ide-ide. Dimana pun dakwah diselenggarakan pasti dipenuhi massa meskipun dilaksanakan di lapangan terbuka. Dakwah diajarkan sebagai materi tersendiri di dayah. Setiap murid dilatih menjadi orator yang ulung. Oleh sebab itu, banyak da'i kondang berasal dari dayah. Dakwah mereka sangat diminati oleh masyarakat khususnya mereka yang menetap di kampung ketimbang dakwah yang dilakukan oleh da'i lulusan sekolah umum atau madrasah, termasuk lulusan dari IAIN-IAIN.

⁸¹Sekretaris pribadi Daud Beureueh

⁸²Salah satu isi ceramahnya dapat dilihat dalam James Siegel, *The Rope of God*, h. 263-275.

Pada awal tahun Orde Baru, Tgk. M. Daud Beureueh melaksanakan safari ke wilayah Aceh untuk berceramah tentang Islam. Perjalanannya disambut oleh masyarakat dan selalu diterima setiap isi ceramahnya. Bukan hanya Tgk. M. Daud Beureueh ulama yang berdakwah tentang masalah tersebut, tetapi ratusan para da'i kondang diundang oleh masyarakat untuk memberi ceramah, khususnya pada waktu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Nuzul Al-Qur'an. Di antara mereka yang terkenal, yaitu Tgk. Ayub Sami dan Tgk. Usman Gumpung di Pidie, Tgk. Hasballah Indrapuri dan Tgk. Abdul Wahab Seulimum di Aceh Besar, Tgk. Tanjung Samalanga dan Tgk. Keumala di Aceh Utara, Tgk. Kruet Lintang dan Tgk. Husein al-Mujahid di Aceh Timur. Di samping menjelaskan masalah ibadah, mereka juga selalu menganjurkan bekerja keras dalam hal peningkatan ekonomi dan memelihara budaya Aceh dengan menjaga Aceh sebagai "Serambi Mekkah" (*the verandah of Mecca*). Beberapa ulama Aceh juga menggunakan media tarekat dalam mendidik rakyat Aceh untuk menjadi orang saleh. Sekitar tahun 1960-an, seorang ulama terkenal Syekh Yatim al-Khalidi, berasal dari Dayah Tangan-tangan, Aceh Barat, mengadakan perjalanan ke seluruh wilayah Aceh untuk mengajak rakyat Aceh menjadi anggota Tarekat Naqsyabandiah. Melalui tarekat ini akan terjalin ikatan antara sesama Muslim, khususnya antara pengikut dan guru.

Regenerasi spiritual masyarakat Aceh merupakan tujuan ulama. Setelah Aceh mendapatkan status Daerah Istimewa, para ulama terlibat dalam membangun keistimewaan daerah ini dalam bidang agama. Di satu pihak, mereka terlibat dalam implementasi hukum Islam di Aceh yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6. 1968.⁸³ Di pihak lain, para ulama juga berdakwah dalam rangka menyatukan masyarakat dalam keimanan dan ajaran Islam. A. Hasjmy, mantan gubernur Aceh, sebagai ulama Aceh menyatakan bahwa Islam merupakan pandangan hidup terbaik. Ulama ini, di samping lebih dikenal sebagai penulis ketimbang da'i, menggunakan penanya dalam kegiatan dakwah. Dalam satu artikelnya, dia mengatakan: "Allah telah menetapkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi masyarakat, tidak hanya urusan pribadi melainkan juga urusan negara dan rakyat. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an terdiri dari berbagai petunjuk, secara tidak langsung dan langsung sebagai kebutuhan aktivitas manusia".⁸⁴

Sampai sekarang, para ulama terus melakukan pengawasan terhadap situasi Aceh, dan setiap sesuatu yang menyalahi keyakinan mereka, akan ditegur oleh mereka. Sekitar tahun 1970-an, para ulama bersama dengan umara (pemerintah) sepakat bahwa

⁸³Lihat "Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No.6/1968 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Unsur-unsur Syariat Islam", dalam Sekretariat DPR-GR Provinsi Daerah Istimewa Aceh Notulen Sidang ke-IV DPR-GR Daerah Istimewa Aceh 1968 (yang Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pelaksanaan Unsur-Unsur Syariat Islam) (Banda Aceh, 1968), h. 365-368).

⁸⁴A. Hasjmy, "Al-Qur'an Sebagai Undang-Undang Dasar Negara," *Sinar Darussalam*, No.1 (Maret, 1968), h. 10.

sesuatu yang maksiat dilarang di Aceh, seperti judi, prostitusi, minuman beralkohol. Kesepakatan ini masih berlaku sampai sekarang. Dengan demikian, ketika pemerintah pusat berkeinginan membangun pabrik alkohol di Aceh pada tahun 1984, ulama memprotesnya. Sebab menurut mereka keinginan ini tidak pantas dengan status Daerah Istimewa Aceh jika memproduksi sesuatu yang dilarang oleh agama yang nampaknya disetujui oleh masyarakat. Kendatipun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa alkohol itu tidak haram, dan menjadi haram hanya jika digunakan sebagai minuman. Ulama Aceh menyatakan bahwa kehadiran pabrik alkohol di Aceh akan mengancam bagi generasi muda. Sebab, mereka akan sangat mudah memperoleh alkohol. Pada tahun 1986, di awal-awal kepemimpinan Ibrahim Hasan sebagai gubernur Aceh, ulama Aceh menuntut pelarangan jual beli PORKAS (lotre) di Aceh. Lotre tersebut dijual secara luas dan karcis-karcisnya di jual di provinsi lain. Menurut ulama Aceh, lotre bertentangan dengan Al-Qur'an, 2:219, 5:50, bahwa judi dan serupa dengan itu dilarang dalam Islam. Telah terbukti dimana-mana bahwa judi akan menimbulkan kejahatan dan merusak keluarga. Akhirnya, pada tahun 1993, lotre dilarang oleh pemerintah di seluruh daerah dalam wilayah Indonesia, setelah diputuskan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga protes-protes dari masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, hal mana ulama juga terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut.⁸⁵

Biasanya, perhatian ulama dengan pendidikan Muslim tidak pernah berhenti. Hampir seluruh dayah-dayah di Aceh, dibangun atas dasar inisiatif ulama, yang selalu merasa kekurangan tempat untuk belajar agama bagi generasi muda. Salah satu indikasi bahwa kegiatan tersebut atas inisiatif ulama, kebanyakan dayah yang didirikan di Aceh adalah atas tanah milik para ulama sendiri. Ketergantungan pada individu-individu para ulama dan kemurahan hatinya juga merupakan bagian yang dapat menjelaskan bahwa ketidakmampuan dayah-dayah untuk bertahan selama-lamanya. Biasanya dayah akan berhenti dari aktivitasnya manakala ulama meninggal karena ulama tersebut sebagai pemimpin dayah dan sekaligus pemilik tanah sebagai tempat didirikan dayah.⁸⁶

Di Aceh, ulama dan dayah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dayah sudah menghasilkan berbagai lulusan agama semenjak pertama kali masyarakat Muslim terbentuk disana. Ulama dayah selalu merespon semua persoalan yang terjadi di Aceh untuk membimbing masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsistensi komitmen mereka kepada Aceh dan masyarakat telah membawa mereka menjadi kelompok yang dihormati dan berpengaruh di Aceh.

⁸⁵ *Observer*, 10-12-1993. Koran ini memberikan penanggalan yang tidak tepat yang diduga dari berita utama yang di dalamnya undian yang dilarang pada tanggal tersebut. Lebih lanjut lihat *Tempo*, 20 Desember (1993), h. 32-39.

⁸⁶ Tgk. Ibrahim Ishaq, *Peranan Dayah dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Umat Lingkungan Hidup dan Bangsa*, makalah disampaikan dalam Hardikda Majelis Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, 7-8 September 1992 di Banda Aceh, h. 1.

